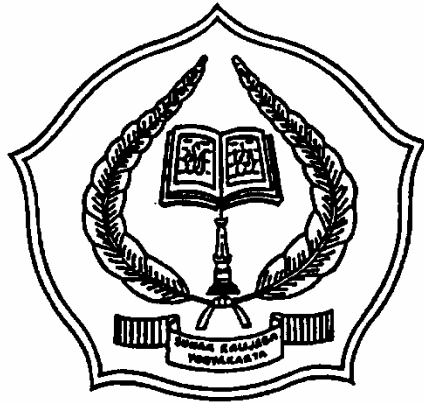


OTONOMI PEREMPUAN MADURA DALAM PERKAWINAN

(Studi Kasus di Desa Poteran Sumenep, Madura)



Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat Islam

Disusun Oleh:

Miftahol Birri

NIM: 04511716

JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT

FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2009

H. Shofiyullah, Mz. S. Ag. M. Ag
Dosen Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Miftahol Birri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Miftahol Birri

Nim : 04511716

Judul : Otonomi Perempuan Madura dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Poteran Sumenep, Madura)

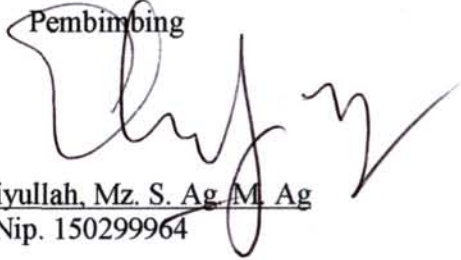
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan **Aqidah dan Filsafat** fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. WB.

Yogyakarta, 13 Mei 2009

Pembimbing


H. Shofiyullah, Mz. S. Ag. M. Ag
Nip. 150299964



PENGESAHAN

Nomor: UIN.02/DU/PP.00.9/1048/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: *Otonomi Perempuan Madura Dalam Perkawinan*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Miftahol Birri

NIM : 04511716

Telah dimunaqosyahkan pada : Kamis, tanggal: 25 Juni 2009

dengan nilai : B+ (82)

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

H. Shofiyullah, Mz, S.Ag, M.Ag

NIP. 19710528 200003 1 001

Penguji I

Dr. Fatimah Husen, MA

NIP. 19651114 199203 2 001

Penguji II

Dr. H. Zuhri, S.Ag, M.Ag

NIP. 19700711 200112 1 001

Yogyakarta, 25 Juni 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin

DEKAN



Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag

NIP. 19691218 198703 2 001

MOTTO

“Kemedeekaan yang hakiki adalah ketika seseorang mempunyai otoritas atas tubuhnya”.

Oleh: Penulis

“Sebaik-baik istri diantara umatku adalah yang paling berseri wajahnya dan paling murah (Sederhana) Maharnya”.

Al-Hadits

PERSEMBAHAN

Tulisan ini kupersembahkan untuk:

- Bapak dan ibuku tercinta yang telah membimbingku dengan sabar, pengertian, serta penuh kasih sayang merupakan modal dasar untuk menggapai cita-cita.
- Mbak, Mas dan Ponakanku, tanpa kalian sadari, keberadaan kalian menjadi motivasi bagiku dalam menyelesaikan studi ini.
- Terakhir tunanganku “Fika” yang tercinta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم . اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله . اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد.

Puji Syukur penulis haturkan kepada Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat beserta Salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya kepada jalan yang lurus.

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan karena telah berhasil merampungkan penulisan skripsi ini. Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Sehingga saran dan kritik sangat penulis harapkan dari para pembaca, tentu saja kritiknya adalah kritik yang konstruktif dan membangun (*critic to build*) bukan kritik yang menjatuhkan (*critic to down*). Meskipun begitu, penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkan penelitian ini.

Penulis menyadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yth. Ibu Dr. Sekar Ayu Aryani, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Drs. Sudin, M.Hum, Selaku Ketua Jurusan Aqidah dan Filsafat, sekaligus menjadi Penasehat Akademik dan Bapak Fahrudin Faiz, S. Ag. M.

Ag., selaku Sekretaris.

3. Yth. Bapak H. Shofiyullah, Mz. S.Ag, M,Ag, selaku dosen pembimbing penulis yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ayahanda beserta Ibundaku tercinta yang telah mencurahkan perhatian tanpa henti-hentinya. Terima kasih atas bimbinganmu, pengorbanan, do'a dan dukungannya yang selama ini menjadi penguat langkah dan pengobat kegetiran jiwa. Semoga Allah mengasihi keduanya sebagaimana mereka mengasihiku semasa kecilku.
5. Kepada Kakak Iparku dan Mbakku tercinta dan tersayang, serta ponakan, terimakasih atas dukungannya, kalian menjadi motivasi tersendiri bagiku.
6. Terakhir buat tunanganku tersayang "Fika" yang selalu memotivasi dalam hidupku, terimakasih atas semuanya.

Buat semua pihak yang telah turut serta membantu penyelesaian skripsi ini. Semoga jasa dan amal baik mereka menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang layak di sisi Allah SWT.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis sendiri dan pembaca sekalian. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 18 Jumadi al-Akhir 1430 H
13 Mei 2009 M

Penulis

Miftahol Birri

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Nota Dinas	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Abstraksi	x

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	14
G. Lokasi Penelitian	16
H. Teknik Pengumpulan Data	16
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II . KONDISI SOSIAL BUDAYA DESA POTERAN

SUMENEP, MADURA

A. Letak Geografis dan Keadaan Alam	20
B. Sosial Ekonomi dan Pendidikan	24
C. Sistem Kekerabatan dan Stratifikasi Sosial	29
D. Peran Sosial Perempuan Desa Poteran	40

BAB III. PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT POTERAN

SUMENEP, MADURA

A. Adat Perkawinan	42
B. Masa Perjodohan	47
C. Fenomena Perkawinan	52
C. 1. Kawin Muda	52
C. 2. Perkawinan Antar saudara Dekat	56
C. 3. Mitos Perawan Tua	59
C. 4. Otoritas Agama Dalam Perkawinan	61
C. 4.1. Pesantrenisasi Perempuan	66
C. 4.2. Konsep Keserasain Dalam Pemilihan Jodoh	68
C. 4.3. Ketidak Berpihakan Doktrin Pesantren	71

BAB IV. PERAN PEREMPUAN DESA POTERAN

DALAM RUMAH TANGGA

A. Patriarkat dan Transaksi Perkawinan	75
B. Perkawinan dan Status Perempuan	83
C. Identitas Diri Perempuan dalam Perkawinan	91
D. Pertaruhan Eksistensi Perempuan dalam Perkawinan	93
E. Dekonstruksi Pandangan atas Budaya: Sebuah Tawaran	98

BAB V . PENUTUP

A. Kesimpulan	105
B. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA	107
----------------------	-----

ABSTRAK

Kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik dan agama terkadang tidak memberikan ruang dan kesempatan sedikitpun bagi perempuan untuk menilai sebuah perkawinan dengan kerangka pikir mereka sendiri, bukan dengan kaca mata orang lain. Madura, yang menganut sistem kekerabatan *patrilineal* cenderung lebih mengedapankan laki-laki dibanding perempuan. Laki-laki selalu diposisikan sebagai pihak yang selalu diuntungkan. Mereka dapat menentukan apapun berdasarkan pola berpikir mereka sendiri. Mereka bebas menilai apapun dengan kaca mata mereka sendiri. Sementara perempuan berada di bawah kuasa laki-laki. Mereka tidak berhak menilai suatu apapun dengan cara pandang mereka. Mereka selalu berada pada posisi yang tidak diuntungkan. Hal ini, sedikit banyak akan berdampak pada otonomi perempuan dalam perkawinan, di mana laki-laki bebas memilih sementara perempuan cenderung pasif.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode lapangan. Semua data yang diperoleh dari lapangan penulis tuangkan dalam sebuah hasil penelitian dan ditunjang dengan studi kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mempelajari secara mendalam dan holistik salah satu budaya yang diciptakan dalam masyarakat Madura. Sedangkan dalam menganalisis data penulis menggunakan studi kasus (*case study*) dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai topik yang dikaji, yaitu otonomi perempuan Madura dalam Perkawinan. Di samping itu, metode studi kasus merupakan *inquiry* empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata.

Hasil yang didapat adalah, bahwa otoritas perempuan dalam perkawinan sampai sekarang masih belum bejalan sama sekali. Perempuan di Desa Poteran, Sumenep, Madura sampai sekarang masih mengalami penindasan. Hilangnya otoritas perempuan Desa Poteran, Sumenep, Madura lebih di dasarkan kepada faktor budaya patriarkhi dan otoritas agama. Ketidak berpihakan agama (dalam hal ini tradisi pesantren) semakin membuat posisi perempuan semakin tidak diuntungkan. Dalam agama (Islam) banyak sekali ajaran yang berdimensi moral-sosial belum disadari sepenuhnya oleh para pengikutnya. Ini kemudian memunculkan persepsi yang eksklusif atau bahkan subyektif di beberapa kalangan masyarakat. Sedangkan Ideologi patriarkhi akan memperpanjang hegemoninya terhadap perempuan. Kedudukan perempuan semakin permanen sebagai *kanca wingking*, teman laki-laki digaris belakang dan menjadi orang yang dibebani kewajiban mengurus rumah tangga.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu wujud sosialitas manusia. Dalam lembaga pernikahan, dua individu dipertemukan, diikat, dan mendapatkan wadah untuk saling mewujudkan impian dan idealismenya. Pernikahan menjadi awal dan cikal-bakal terbentuknya unit komunitas terkecil dalam masyarakat, yakni keluarga, yang akan menjalankan fungsinya dalam struktur dan tatanan masyarakat yang lebih luas. Pernikahan, yang menjadi semacam ritus sosial untuk memberikan legitimasi bagi orang yang hendak membentuk keluarga, dengan demikian menjadi salah satu tahapan dalam perkembangan perjalanan hidup manusia.

Namun sebagai makhluk sosial, perkawinan tidak bisa lepas dari peran keluarga atau orang tua. Di sini perkawinan tidak lagi dimaknai sebagai pertemuan dua individu, melainkan lebih pada pertemuan dua keluarga yang semestinya mereka dapat menentukan arah perkawinan. Karenanya, dalam masyarakat seringkali ditemukan adanya proses negosiasi dan tarik-menarik antara aspek personalitas dan sosialitas pernikahan dan keluarga itu sendiri.

Di beberapa kelompok masyarakat misalnya ditemukan semacam praktik “pernikahan yang diatur” (*arranged marriage*) yang menyiratkan leburnya dimensi

personalitas dalam dimensi sosialitas pernikahan.¹ Orangtua, keluarga, atau komunitas, berperan lebih besar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan pernikahan. Dilihat dari segi yang lain, ini juga menunjukkan bahwa pada dasarnya pernikahan bukan saja melibatkan dua individu, tapi juga dua keluarga, dua komunitas. Lebih dari itu, ada pula *episteme* sosial yang perannya tak bisa dilewatkan, yang mewujud dalam tradisi atau norma-norma masyarakat.²

Perkawinan tidak dapat lepas begitu saja dari nilai, tradisi atau norma-norma yang telah terbentuk dalam sosial masyarakat itu sendiri. Karena itu, perkawinan yang sebenarnya sangat personal kemudian menjadi persoalan sosial.

Kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik dan agama terkadang tidak memberikan ruang dan kesempatan sedikitpun bagi perempuan untuk menilai sebuah perkawinan dengan kerangka pikir mereka sendiri, bukan dengan kaca mata orang lain. Madura, yang menganut sistem kekerabatan *patrilineal* cenderung lebih mengedapankan laki-laki dibanding perempuan. Laki-laki selalu diposisikan sebagai pihak yang selalu diuntungkan. Mereka dapat menentukan apapun berdasarkan pola berpikir mereka sendiri. Mereka bebas menilai apapun dengan kaca mata mereka sendiri.

Sementara perempuan berada di bawah kuasa laki-laki. Mereka tidak berhak menilai suatu apapun dengan cara pandang mereka. Mereka selalu berada pada posisi

¹. Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 28-30.

². *Ibid.*, hlm. 21-29.

yang tidak diuntungkan. Hal ini, sedikit banyak akan berdampak pada otonomi perempuan dalam perkawinan, di mana laki-laki bebas memilih sementara perempuan cenderung pasif.

Beda halnya dengan posisi perempuan dalam sistem perkawinan yang berlaku di Desa Poteran Madura. Sistem yang berlaku adalah sistem perkawinan *matrilokal*, dimana pasangan menikah harus tinggal di rumah keluarga perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa secara ekonomi kedudukan perempuan sangat kuat. Perempuan dilindungi oleh pola menetap setelah menikah dan pola pemukiman *taneyan lanjang* di mana rumah dan tanah diperuntukkan bagi perempuan sedangkan suami yang menetap di lingkungan kerabat isteri diposisikan sebagai “*orang datang*”.³

Dalam komunitas ini, perempuan sangat kuat secara ekonomi. Dalam dua sistem sosial ini, kemudian melahirkan sebuah kerancuan. Di satu sisi posisi perempuan sangat kuat secara ekonomi dengan pola pemukiman *taneyan lanjang*. Namun, di sisi yang lain keberadaan tubuhnya menjadi penghambat dalam memperoleh akses terhadap ekonomi keluarga. Dalam kasus perkawinan misalnya, ternyata posisi dan peran perempuan dalam komunitas ini masih kurang diperhitungkan.

Keberadaannya masih dianggap sebagai manusia yang masih perlu diarahkan dan diawasi. Segala keputusan yang terkait dengan persoalan perkawinan harus

³ . Welhendri Azwar, *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik; Studi Kasus Tentang Perempuan dalam Tradisi Bajapuik* (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. 57-59.

bermuara pada keputusan keluarga. Berbeda dengan laki-laki yang selalu bebas dalam menentukan arah perkawinannya.

Realitas ini, secara tidak langsung berdampak pada posisi dan perempuan dalam perkawinan. Perempuan Madura masih ditempatkan pada suatu posisi yang secara kategoris tidak pernah diberikan kesempatan untuk melakukan pilihan-pilihan dalam menjalani kehidupan berumah tangga dibandingkan dengan laki-laki. Ruang pilih perempuan dijadikan sedemikian sempit, sehingga keinginan dan harapan-harapan yang telah lama diimpikan sirna oleh keberadaan rahim dalam tubuh mereka sendiri.

Ketika perempuan mempertanyakan keniscayaan tersebut sebagaimana layaknya manusia yang mampu berpikir merdeka, mereka dianggap melawan kehendak alam. Kenyataan biologis antara laki-laki dan perempuan yang dijadikan sebagai patokan yang kemudian akan berakibat pada perbedaan peran serta dapat mempengaruhi pada perilaku sosial masing-masing jenis kelamin. Perempuan lebih dipersepsikan sebagai sosok yang lemah, pasif, kurang merdeka dan hanya pantas menerima apa yang telah menjadi kebiasaan, sementara laki-laki identik dengan kebebasan memilih jalan hidupnya yang secara matematis lebih menguntungkan. Dalam situasi dan kondisi yang serba modern serta banyaknya perempuan yang terlibat dalam dunia publik, ternyata tidak membuat perempuan sadar akan hak-hak yang dimilikinya.

Berdasarkan fenomena di atas, hal ini sangat menarik untuk dikaji, berkaitan dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Desa Poteran Madura.

Tarik ulur antara personalitas dan sosialitas perkawinan dalam arus modernisasi akan menjadi hal yang sangat bagus untuk diteliti secara mendalam. Sistem kekerabatan yang patrinal– matrilokal juga menjadi permasalahan unik yang kemungkinan besar berbeda dengan daerah lainnya yang menganut patrilineal – patrilokal atau matrilineal dan matrilokal.

B. Rumusan Masalah

1. Apa arti otonomi perempuan bagi masyarakat Desa Poteran Madura?
2. Bagaimana bentuk otonomi perempuan Desa Poteran dalam Rumah Tangga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sedangkan tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk, *pertama*, melihat dan mencermati persoalan arti dari otonomi perempuan bagi masyarakat Desa Poteran Madura. *Kedua*, mengetahui bentuk-bentuk dari otonomi perempuan Desa Poteran Madura dalam Rumah Tangga.

D. Tinjauan Pustaka

Studi tentang realitas budaya masyarakat Madura telah banyak dilakukan oleh para ilmuwan. Di antara sekian banyak penelitian yang telah dilakukan, peneliti hanya menemukan satu judul buku yang secara serius membahas tentang perempuan

Madura yakni buku yang ditulis oleh Djamaluddin Karim⁴ dengan judul "*Pemimpin Wanita Madura*". Secara gamblang buku ini membahas tentang peran perempuan Madura berkiprah dalam ranah kekuasaan seperti halnya menjadi kepala desa (*klebun*). Dalam buku ini menggambarkan bahwa perempuan di Madura juga mendapatkan peran dalam menentukan kebijakan-kebijakan publik yang selama ini hanya dilakukan oleh kaum laki-laki.

Munculnya kepemimpinan wanita ini disamping didukung oleh dukungan sosial dan dukungan politik setempat juga didukung oleh faktor budaya dimana pengkaderan seorang pemimpin berjalan secara turun temurun. Jika kakek atau orang tua telah menjadi kepala desa, maka sangat memungkinkan bagi seorang perempuanpun menjadi kepala desa dengan menggunakan kharisma kakek atau orang tuanya, tetapi hal ini bukan berarti seorang perempuan mampu menjadi penguasa atas dasar kemampuan pribadi.

Hasil penelitian di atas, berbeda dengan apa yang dilakukan dan diinginkan oleh peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Djamaluddin menitik-beratkan pada peran perempuan Madura dalam memimpin dan menentukan arah kebijakan publik dalam masyarakat. Sedangkan studi yang dilakukan oleh peneliti ini membahas tentang otonomi perempuan Madura terhadap dirinya sendiri dalam menentukan arah hidupnya sendiri yang lebih menekankan pada persoalan keluarga.

⁴. Djamaluddin Karim, *Pemimpin Wanita Madura* (Surabaya: Popyrus, 2004), hlm.13-17.

Selain itu, penelitian dengan tempat yang sama juga pernah dilakukan oleh Huub De Jonge⁵ dengan judul "*Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam*". Dalam penelitian ini Huub De Jonge mencoba untuk menguui tentang peubahan yang terjadi pada masyarakat Madura. De Jonge lebih menfokuskan penelitiannya kepada perubahan-perubahan struktur yang terjadi di tengah masyaakat dari masa kemasa, dimulai dari masa kolonial (penjajahan Belanda), penjajahn Jepang, Masa kemerdekaan dan teakhir pada masa pemerintahan orde baru.

Dalam penelitiannya, De Jonge mencoba untuk menguarai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hubungan simbiosis (timbang balik) yang terjadi antara sistem perdagangan oang Madura dengan keberagamaan yang dianut oleh orang Madura. Seperti yang diungkapkan oleh De Jonge, orang Madura sangat kental dengan keislamannya.

Kuntowijoyo⁶ dengan judul "*Perubahan Sosial dalam masyarakat Agraris Madura 1850-1940*". Dalam penelitiannya Kuntowijoyo ini lebih difokuskan kepada perubahan sosial dalam masyarakat agraris Madura, dimana perubahan-perubahan yang dimaksudkan oleh Kuntowijoyo adalah perubahan pola prilaku dan sistem ekonomi masyarakat Madura, yang sebelumnya mengandalkan pertanian kini telah berubah menjadi pola berdagang dan merantau ke tempat lain.

⁵. HuubDe Jonge, *Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam* (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 10-13.

⁶. Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam masyarakat Agraris Madura 1850-1940* (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002), hlm. 23-25.

Seperti yang telah di ketahui Madura merupakan daerah yang kering dan tandus, mau tidak mau masyarakatnya harus hidup dengan pola yang berbeda, seperti bedagang atau mencari peruntungan di negeri orang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kuntowijoyo di atas belum menyentuh sama sekali tentang otonomi perempuan seperti yang akan peneliti lakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Najlah Naqiyah dengan judul "*Otonomi Perempuan*", lebih menitik beratkan kepada persoalan otoritas perempuan dalam ranah publik. Bagaimana seorang menentukan otoritas akan tubuhnya sendiri tanpa ada paksaan dan intervensi dari pihak lain.⁷ Selama ini dalam posisi perempuan selalu dimarginalisasikan, posisi perempuan selalu tidak diuntungkan lantaran perberbedaan gender dan jenis kelamin. Selain itu, perempuan terlalu dikekang oleh tradisi, budaya, dan ajaran agama yang berlaku. Otoritas orang tua atas tubuh perempuan lebih berperan dibandingkan otoritas pemilik tubuh itu sendiri.⁸ Dalam penelitiannya Najlah tidak disinggung sama sekali tentang otoritas perempuan dalam perkawinan, baik dalam menentukan jodoh maupun bentuk dan ragam dari otoritas itu sendiri.

Studi yang akan peneliti lakukan ini secara khusus dan mendalam membahas tentang otonomi perempuan Madura dalam perkawinan. Nilai-nilai yang dibangun dari pemahaman tentang agama, budaya dan ekonomi sebenarnya menyimpan berbagai macam makna yang kemungkinan besar akan mempengaruhi pada otonomi

⁷. Najlah Naqiyah, *Otonomi Perempuan* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 56-57.

⁸. *Ibid.*, hlm. 60-62.

perempuan. Karena itu, tidak menutup kemungkinan bagi peneliti untuk ikut andil dalam menggali dan menganalisa hal tersebut.

Dari beberapa referensi yang telah peneliti kaji hingga saat ini belum ada yang memiliki kesamaan materi, metodologi dan perspektif dengan penelitian yang peneliti ajukan ini.

E. Kerangka Teori

Masalah hak-hak perempuan bukanlah hal yang mudah untuk diteliti, mengingat istilah yang demikian konseptual, harus dioperasionisasikan dalam bentuk gejala-gejala yang konkret, spesifik dan dapat diamati. Masalah hak-hak perempuan, lebih khusus lagi, hak perempuan dalam perkawinan, harus dilihat dalam kaitannya dengan peran, posisi, status, nilai, serta posisi tawar perempuan dalam hubungannya dengan pihak lain. Karenanya, perspektif gender menjadi alat analisa penting dalam melihat masalah-masalah perempuan dan hak-hak perempuan.

Banyaknya faktor yang mempengaruhi kehidupan perempuan selama ini mengundang para pemikir untuk mengkaji ulang kemungkinan adanya kesalahan dalam tatanan hidup ini. Kekhawatiran tersebut tertuju pada adanya ideologi tersembunyi dalam suatu masyarakat yang memiliki peran signifikan dalam membentuk karakter serta pola berpikir perempuan. Karena itu, apapun yang dilakukan, dalam kajian gender tidak boleh mengesampingkan peran budaya lokal dalam merekonstruksi pola hidup manusia.

Budaya patriarkhi (ideologi lelaki-lakian) misalnya, yang muncul dari sistem hukum Yunani dan Romawi, di mana lelaki-laki memegang kekuasaan atas semua peran penting masyarakat baik dalam pemerintahan, pendidikan, industri, bisnis, perawatan kesehatan, dan dalam lingkup keluarga akan berakibat pada tercerabutnya peran perempuan dari akses terhadap kekuasaan itu. Karena itu, perkawinan yang secara substansial merupakan ilustrasi dari sebuah interaksi simbolik antara makhluk perempuan dan lelaki-laki dalam sebuah kesetaraan dan kehendak bersama, telah diselewengkan secara esensial maknanya dalam konteks masyarakat patriarkhi.⁹

Memposisikan lelaki-laki sebagai sosok yang bertanggung jawab dalam bidang publik dan wanita di bidang domestik, tentunya akan menimbulkan ketimpangan gender yang terus menerus. Dalam kenyataannya, wanita selalu disosialisasikan ke dalam suatu nilai dan ukuran sosial budaya yang pilihan-pilihannya ditentukan oleh lelaki-laki dalam kerangka struktural patriarkal (ideologi kelakilian).¹⁰ Asosiasi seperti ini, kadang diperkuat oleh mitos-mitos yang memperkuat dan melestarikan bahwa tempat lelaki-laki adalah di dunia kerja dalam perjuangannya untuk hidup, sementara tempat wanita di rumah, mengatur rumah tangga dan mengasuh anak. Proses sosialisasi ini dapat membatasi pilihan-pilihan hidup.

⁹. Eko Bambang Subiantoro, *Memikirkan Perkawinan*. (Jakarta: Yayasan Perempuan, 2002), hlm. 8.

¹⁰. Irwan Abdullah, *Reproduksi Ketimpangan Gender: Partisipasi Wanita dalam Kegiatan Ekonomi*. Prisma Edisi 6 Juni 1995.

Hal ini tidak lepas dari peran lingkungan sekitar seperti keluarga, sekolah dan media massa yang merupakan sumber utama dalam memahami sosok wanita yang sesuai dengan tatanan sosial. Lingkungan tersebut merupakan institusi yang sangat penting dalam membentuk hubungan laki-laki dan wanita dalam berbagai aspek kehidupan. Proses internalisasi ini akan menjadi dasar di mana laki-laki tetap lebih mampu dari perempuan.

Proses ini merupakan konstruksi yang terus menerus menegaskan suatu realitas yang mempunyai daya paksa. Apa yang diajarkan dalam keluarga atau institusi lainnya dapat dijadikan sebagai nilai atau norma yang harus diikuti dan berlaku secara sosial.¹¹ Akar sosial budaya di atas telah memberi warna dalam keterlibatan wanita dalam bidang publik. Pemaknaan keterlibatan wanita dalam sektor publik ternyata juga ditentukan oleh budaya dan ideologi.

Pengelompokan wanita ke dalam bidang domestik dan kewanitaan dapat menyebabkan terdapat adanya proses identifikasi pekerjaan-pekerjaan publik yang sesuai dengan wanita. Situasi ekonomi, sosial dan politik seseorang turut menentukan keluasan gerak transendensinya. Dalam budaya patriarkhi, sebagai jenis kelamin kedua, kehidupan ekonomi, sosial dan politik perempuan bukan hanya dibatasi, melainkan tidak diakui. Yang terjadi adalah perempuan hidup untuk menunjang kehidupan ekonomi, sosial dan politik laki-laki.

¹¹ . *Ibid.*, hlm. 39-40.

Melalui institusi ekonomi, sosial dan politik, budaya patriarki mencetak diri perempuan sesuai dengan citra ideal perempuan sebagai jenis kelamin kedua. Dari paradigma yang seperti itulah kemudian mencuatlah ke permukaan isu tentang kesetaraan dan keadilan (*equality*) gender. Ini diamini oleh semua kalangan mulai dari penentu kebijakan, akademisi maupun para aktivis pembela hak-hak perempuan sendiri untuk dijadikan semacam wacana (*discourse*). Isu ini juga menjadi sebuah refleksi atas kesadaran akan ketertindasan hak-hak perempuan.

Manifestasi dari kesadaran ini kemudian melahirkan gerakan feminis, sebuah gerakan yang pertama kali muncul di Perancis pada tahun 1880-an, yang berjuang untuk memperoleh hak politik perempuan. Gerakan feminisme berupaya membongkar mitos yang melahirkan stereotipe bahwa perempuan adalah “barang antik” yang selalu harus dijaga dan diperlakukan dengan sangat istimewa. Yang menjadi permasalahan adalah bahwa perlakuan istimewa itu melahirkan sebuah konstruksi sosial yang justru menindas hak-hak sosial perempuan itu sendiri.

Kekeliruan dalam memahami dan menginterpretasikan perbedaan gender (*gender differences*) pada suatu komunitas masyarakat, kemudian melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Salah satu contoh adalah, adanya sistem nilai yang memandang bahwa tugas pokok perempuan hanyalah di bidang domestik sedang laki-laki wilayah publik. Karena itu, konsep gender dipergunakan sebagai salah satu alat analisis dalam studi perempuan. Menurut konsep ini, kategori perempuan dan laki-laki bukan merupakan fenomena biologis, tetapi konstruksi-konstruksi kultural yang oleh karenanya berubah-ubah.

Dalam bukunya, *The Second Sex*, Simon de Beauvoir mencela determinisme biologis yang merupakan teorisasi pembedaan antara seks dominan.¹² Ide bahwa alam adalah takdir, dan bahwa perempuan karena daya prokreatifnya bertanggung jawab terhadap urusan-urusan rumah tangga, pengasuhan dan pemeliharaan yang secara alamiah merupakan seks yang lemah, mempengaruhi dunia ilmu pengetahuan dan cara pandang masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. De Beauvoir berpandangan bahwa pemahaman tentang oposisi kembar antara seks, merupakan realitas biologis yang ditafsirkan secara kultural.¹³

Wacana-wacana tersebut tidak mustahil juga terjadi pada posisi dan perempuan Madura. Keberadaan tubuhnya sangat mempengaruhi terhadap posisi dan perannya. Sebagai jenis kelamin kedua (*the second sex*) dalam struktur masyarakat, mereka tak dapat mengolah kebebasan dan identitas kediriannya dalam kegiatankegiatan yang positif, konstruktif, dan aktual. Dalam situasi yang demikian ini, pola relasi kaum laki-laki dan perempuan menjadi tak ramah lagi. Kaum laki-laki tak menghendaki adanya ketegangan relasi subjek-objek, sebagaimana dijelaskan oleh filsuf-filsuf eksistensial, dengan menyangkal subjektivitas perempuan dan menjadikannya sebagai pengada lain absolut.¹⁴

¹². Simone De Beauvoir, *The Second Sex: Kehidupan Perempuan* (terj). (Surabaya: Pustaka Prometheus, 2003), hlm. 120.

¹³. *Ibid.*, hlm. 112-115

¹⁴ Shirley Lie, *Pembebasan Tubuh Perempuan: Gugatan Etis Simone de Beauvoir Terhadap Budaya Patriarkhat* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm. 43-48.

Adanya distingsi kerja antara wilayah domestik dan publik, menurut kaum fenimisme radikal, semakin memperkuat dominasi laki-laki atas perempuan, yang sekaligus memenjarakan dan meminggirkan kaum perempuan dari peran publik atau sosial. Penciptaan dikotomi ini merupakan ciri khas dan cara kerja sistem patriarkhi. Bagi mereka akar penyebab penindasan terhadap hak-hak sosial perempuan terletak pada ideologi patriarkhi yang dikonstruksi dan disosialisasikan secara kultural.¹⁵ Patriarkhi, sebagai sebuah sistem yang sangat koheren selalu dianggap sebagai salah satu sebab dari timbulnya pensubornasian dan pendiskriminasian perempuan dalam hubungan-hubungan sosial.

Dalam konteks keluarga, patriarkhi memposisikan perempuan sebagai pihak yang kedua. Akibatnya, perempuan tidak memiliki hak untuk memutuskan sesuatu dalam keluarga. Argumen seperti ini hanya membuat stereotipe ideologi patriarkhi terhadap perempuan semakin nyata. Ideologi patriarkhi dapat muncul dalam bentuk simbol-simbol budaya yang memposisikan perempuan sebagai sub-ordinat dalam hubungannya dengan laki-laki diarahkan apapun, tidak hanya dalam keluarga tetapi juga dalam konteks masyarakat.¹⁶ Karena itu, perempuan mulai dihadapkan dengan posisi dan peran keluarga. Mereka harus terlebih dahulu mencermati fenomena yang terjadi dalam keluarga, sebelum mereka berjuang melawan arus budaya-budaya luar.

¹⁵ . Mansour Fakih, *Merekonstruksi Realitas dengan Perspektif Gender*, Kata Pengantar Sih Handayani dan Yos Soetiyoso (Ed). *Merekonstruksi Realitas dengan Perspektif Gender*.: (Yogyakarta: Serikat Bersama Perempuan Yogyakarta, 1997), hlm. 85.

¹⁶ . Farida, *Poligami: Dilema Bagi Perempuan* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2002), hlm. 38-39.

F. Metode Penelitian

Tidak mudah untuk menguraikan persoalan yang dikaji dalam penelitian ini. Karena itu, penelitian ini memerlukan metode sebagai salah satu upaya untuk memperoleh apa yang diinginkan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mempelajari secara mendalam dan holistik salah satu budaya yang diciptakan dalam masyarakat Madura. Penelitian kualitatif ini dipilih karena hal ini sangat menekankan bahwa sifat penelitian ini penuh dengan nilai (*valueladen*).¹⁷

Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menekankan bagaimana pikiran dan pengalaman sosial diciptakan dan diberi arti. Bila dilihat dari tujuan dari penelitian ini, tipe dalam studi ini adalah penelitian deskriptif (*description research*), yaitu penelitian yang di dalamnya memberikan uraian secara deskriptif berkenaan dengan suatu kolektifitas tertentu, sehingga dengan tipe penelitian ini dicermati fenomena otonomi perempuan Madura (Desa Poteran) dalam perkawinan tidak sekedar sebagai fenomena alam, melainkan hasil dari konstruksi sosial yang terbangun oleh nilai-nilai agama, budaya, ekonomi atau lainnya. Tipe ini dipakai, karena tujuan utamanya adalah menggambarkan secara detail realitas sosial yang begitu kompleks.¹⁸

Secara metodologis, dasar dari penelitian ini adalah menggunakan studi kasus (*case study*) dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan yang mendalam

¹⁷. Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 25-26.

¹⁸. J. Vrendenbregt, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 34.

mengenai topik yang dikaji, yaitu otonomi perempuan Madura dalam Perkawinan. Metode dasar ini digunakan sebagai suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan (*wholness*) dari obyek yang diteliti, sehingga data yang dikumpulkan dalam studi kasus ini dapat dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi. Di samping itu, metode studi kasus merupakan *inquiry* empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Bukti sumber-sumber dapat dimanfaatkan jika batas-batas antara fenomena dan konteks tidak kelihatan dengan jelas.¹⁹

G. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan tepatnya di Desa Poteran Sumenep Madura. Pemilihan lokasi dan *setting* sosial ini didasarkan pada beberapa alasan: *pertama*, di desa ini banyak ditemukan bahwa keputusan perkawinan masih berada di tangan orang tua. *Kedua*, kuatnya peran agama dan budaya dalam persoalan perkawinan anak perempuan. *Ketiga*, banyaknya perempuan yang terlibat dalam sektor ekonomi formal untuk menunjang ekonomi keluarga *Keempat*, pendidikan perempuan mulai diarahkan pada pendidikan formal tetapi mayoritas mereka masih berpendidikan pesantren. Hal seperti yang diungkapkan di ataslah yang menjadikan lokasi ini menarik untuk diteliti.

¹⁹ . *Ibid.*, hlm. 32.

H. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data-data yang dikumpulkan langsung pada saat penelitian lapangan. Sementara itu data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan lebih detail tentang penggunaan ketiga teknik pengumpulan data tersebut, yaitu:

1. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap obyek penelitian.²⁰

Observasi merupakan langkah awal penelitian, tujuannya untuk melihat persoalan umum dan mendasar berkaitan dengan otonomi perempuan. Fokus observasi yaitu: a) keluarga atau rumah tangga yang terkait; b) perempuan yang sudah menikah dan yang belum menikah; c) tokoh masyarakat. Dalam kegiatan ini, peneliti tinggal dan terlibat dalam masyarakat untuk mengamati kesehariannya serinci mungkin dan dikumpulkan sehingga menjadi suatu catatan lapangan atau *fieldnotes*. Hasil pengamatan ini kemudian digunakan untuk merumuskan langkah-langkah penelitian lebih lanjut. Observasi lapangan dilakukan beberapa kali sampai penelitian ini selesai dilaksanakan.

²⁰. Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 30-31.

2. *Indepth interview*, yaitu wawancara mendalam kepada kelurga dan perempuan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.²¹ Tujuannya adalah untuk mengetahui persepsi dan sikap mereka berkaitan dengan tema penelitian *Indepth interview* dilakukan kepada para tokoh masyarakat yang memahami dan sering terlibat langsung. Di samping itu juga dilakukan wawancara terhadap sekitar delapan perempuan yang telah menikah dalam usia dibawah 17 tahun serta perempuan yang telah ditunangkan dalam masa pendidikan Sekolah Dasar dan dengan atas dasar perjodohan. Penelitian ini juga melibatkan enam orang tua perempuan yang terkait serta dua tokoh masyarakat. Menurut hemat peneliti, jumlah informan tersebut dianggap cukup untuk mendapatkan informasi yang dapat menjawab permasalahan penelitian.

3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumendokumen yang terkait dengan tema penelitian.²² Dokumen-dokumen tersebut berupa laporan hasil penelitian, buletin, jurnal, laporan kegiatan, prosiding seminar atau lokakarya, rencana kegiatan, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengelolaan, data statistik, buku, dan lain-lain.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman isi dan esensi dari skripsi ini. Maka deskripsi ini akan disistematisasikan penyajiannya berdasarkan kategorisasi pembahasan sebagai berikut:

²¹. *Ibid.*, hlm. 30.

²². *Ibid.*, hlm. 31

Diawali dengan *Bab I*, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Kemudian *Bab II*, berbicara tentang kondisi sosial-budaya masyarakat Madura, kedudukan dan status perempuan Madura.

Selanjutnya *Bab III*, perkawinan dalam masyarakat Madura, mencakup kepada adat perkawinan, masa perijodohan, fenomena perkawinan, kemudian adanya otoritas pesantren yang menyebabkan hal ini terjadi dan ketidak berpihakan pesantren.

Sedangkan *Bab IV*, yang merupakan intisari pembahasan yang mengetengahkan tentang otonomi perempuan Madura dalam perkawinan. Dalam hal ini penulis mencoba mengetengahkan beberapa persoalan yang sekiranya mampu menjawab rumusan masalah sebelumnya. Pertama, masalah patriarkhi dan adat perkawinan, kedua, masalah perkawinan dan status perempuan dalam keluarga, ketiga, identitas diri perempuan dalam keluarga, keempat, pertaruhan eksistensi perempuan dalam perkawinan, kelima, dekonstruksi pandangan atas budaya merupakan sebuah tawaran.

Terakhir *Bab V*, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis berdasarkan seluruh hasil pembahasan yang dilakukan dan ditekuni selama dalam proses awal sampai akhir penyusunan skripsi ini.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu wujud sosialitas manusia. Dalam lembaga pernikahan, dua individu dipertemukan, diikat, dan mendapatkan wadah untuk saling mewujudkan impian dan idealismenya. Pernikahan menjadi awal dan cikal-bakal terbentuknya unit komunitas terkecil dalam masyarakat, yakni keluarga, yang akan menjalankan fungsinya dalam struktur dan tatanan masyarakat yang lebih luas. Pernikahan, yang menjadi semacam ritus sosial untuk memberikan legitimasi bagi orang yang hendak membentuk keluarga, dengan demikian menjadi salah satu tahapan dalam perkembangan perjalanan hidup manusia.

Namun sebagai makhluk sosial, perkawinan tidak bisa lepas dari peran keluarga atau orang tua. Di sini perkawinan tidak lagi dimaknai sebagai pertemuan dua individu, melainkan lebih pada pertemuan dua keluarga yang semestinya mereka dapat menentukan arah perkawinan. Karenanya, dalam masyarakat seringkali ditemukan adanya proses negosiasi dan tarik-menarik antara aspek personalitas dan sosialitas pernikahan dan keluarga itu sendiri.

Di beberapa kelompok masyarakat misalnya ditemukan semacam praktik “pernikahan yang diatur” (*arranged marriage*) yang menyiratkan leburnya dimensi

personalitas dalam dimensi sosialitas pernikahan.¹ Orangtua, keluarga, atau komunitas, berperan lebih besar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan pernikahan. Dilihat dari segi yang lain, ini juga menunjukkan bahwa pada dasarnya pernikahan bukan saja melibatkan dua individu, tapi juga dua keluarga, dua komunitas. Lebih dari itu, ada pula *episteme* sosial yang perannya tak bisa dilewatkan, yang mewujud dalam tradisi atau norma-norma masyarakat.²

Perkawinan tidak dapat lepas begitu saja dari nilai, tradisi atau norma-norma yang telah terbentuk dalam sosial masyarakat itu sendiri. Karena itu, perkawinan yang sebenarnya sangat personal kemudian menjadi persoalan sosial.

Kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik dan agama terkadang tidak memberikan ruang dan kesempatan sedikitpun bagi perempuan untuk menilai sebuah perkawinan dengan kerangka pikir mereka sendiri, bukan dengan kaca mata orang lain. Madura, yang menganut sistem kekerabatan *patrilineal* cenderung lebih mengedapankan laki-laki dibanding perempuan. Laki-laki selalu diposisikan sebagai pihak yang selalu diuntungkan. Mereka dapat menentukan apapun berdasarkan pola berpikir mereka sendiri. Mereka bebas menilai apapun dengan kaca mata mereka sendiri.

Sementara perempuan berada di bawah kuasa laki-laki. Mereka tidak berhak menilai suatu apapun dengan cara pandang mereka. Mereka selalu berada pada posisi

¹. Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 28-30.

². *Ibid.*, hlm. 21-29.

yang tidak diuntungkan. Hal ini, sedikit banyak akan berdampak pada otonomi perempuan dalam perkawinan, di mana laki-laki bebas memilih sementara perempuan cenderung pasif.

Beda halnya dengan posisi perempuan dalam sistem perkawinan yang berlaku di Desa Poteran Madura. Sistem yang berlaku adalah sistem perkawinan *matrilokal*, dimana pasangan menikah harus tinggal di rumah keluarga perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa secara ekonomi kedudukan perempuan sangat kuat. Perempuan dilindungi oleh pola menetap setelah menikah dan pola pemukiman *taneyan lanjang* di mana rumah dan tanah diperuntukkan bagi perempuan sedangkan suami yang menetap di lingkungan kerabat isteri diposisikan sebagai “*orang datang*”.³

Dalam komunitas ini, perempuan sangat kuat secara ekonomi. Dalam dua sistem sosial ini, kemudian melahirkan sebuah kerancuan. Di satu sisi posisi perempuan sangat kuat secara ekonomi dengan pola pemukiman *taneyan lanjang*. Namun, di sisi yang lain keberadaan tubuhnya menjadi penghambat dalam memperoleh akses terhadap ekonomi keluarga. Dalam kasus perkawinan misalnya, ternyata posisi dan peran perempuan dalam komunitas ini masih kurang diperhitungkan.

Keberadaannya masih dianggap sebagai manusia yang masih perlu diarahkan dan diawasi. Segala keputusan yang terkait dengan persoalan perkawinan harus

³ . Welhendri Azwar, *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik; Studi Kasus Tentang Perempuan dalam Tradisi Bajapuik* (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. 57-59.

bermuara pada keputusan keluarga. Berbeda dengan laki-laki yang selalu bebas dalam menentukan arah perkawinannya.

Realitas ini, secara tidak langsung berdampak pada posisi dan perempuan dalam perkawinan. Perempuan Madura masih ditempatkan pada suatu posisi yang secara kategoris tidak pernah diberikan kesempatan untuk melakukan pilihan-pilihan dalam menjalani kehidupan berumah tangga dibandingkan dengan laki-laki. Ruang pilih perempuan dijadikan sedemikian sempit, sehingga keinginan dan harapan-harapan yang telah lama diimpikan sirna oleh keberadaan rahim dalam tubuh mereka sendiri.

Ketika perempuan mempertanyakan keniscayaan tersebut sebagaimana layaknya manusia yang mampu berpikir merdeka, mereka dianggap melawan kehendak alam. Kenyataan biologis antara laki-laki dan perempuan yang dijadikan sebagai patokan yang kemudian akan berakibat pada perbedaan peran serta dapat mempengaruhi pada perilaku sosial masing-masing jenis kelamin. Perempuan lebih dipersepsikan sebagai sosok yang lemah, pasif, kurang merdeka dan hanya pantas menerima apa yang telah menjadi kebiasaan, sementara laki-laki identik dengan kebebasan memilih jalan hidupnya yang secara matematis lebih menguntungkan. Dalam situasi dan kondisi yang serba modern serta banyaknya perempuan yang terlibat dalam dunia publik, ternyata tidak membuat perempuan sadar akan hak-hak yang dimilikinya.

Berdasarkan fenomena di atas, hal ini sangat menarik untuk dikaji, berkaitan dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Desa Poteran Madura.

Tarik ulur antara personalitas dan sosialitas perkawinan dalam arus modernisasi akan menjadi hal yang sangat bagus untuk diteliti secara mendalam. Sistem kekerabatan yang patrinal– matrilokal juga menjadi permasalahan unik yang kemungkinan besar berbeda dengan daerah lainnya yang menganut patrilineal – patrilokal atau matrilineal dan matrilokal.

B. Rumusan Masalah

1. Apa arti otonomi perempuan bagi masyarakat Desa Poteran Madura?
2. Bagaimana bentuk otonomi perempuan Desa Poteran dalam Rumah Tangga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sedangkan tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk, *pertama*, melihat dan mencermati persoalan arti dari otonomi perempuan bagi masyarakat Desa Poteran Madura. *Kedua*, mengetahui bentuk-bentuk dari otonomi perempuan Desa Poteran Madura dalam Rumah Tangga.

D. Tinjauan Pustaka

Studi tentang realitas budaya masyarakat Madura telah banyak dilakukan oleh para ilmuwan. Di antara sekian banyak penelitian yang telah dilakukan, peneliti hanya menemukan satu judul buku yang secara serius membahas tentang perempuan

Madura yakni buku yang ditulis oleh Djamaluddin Karim⁴ dengan judul "*Pemimpin Wanita Madura*". Secara gamblang buku ini membahas tentang peran perempuan Madura berkiprah dalam ranah kekuasaan seperti halnya menjadi kepala desa (*klebun*). Dalam buku ini menggambarkan bahwa perempuan di Madura juga mendapatkan peran dalam menentukan kebijakan-kebijakan publik yang selama ini hanya dilakukan oleh kaum laki-laki.

Munculnya kepemimpinan wanita ini disamping didukung oleh dukungan sosial dan dukungan politik setempat juga didukung oleh faktor budaya dimana pengkaderan seorang pemimpin berjalan secara turun temurun. Jika kakek atau orang tua telah menjadi kepala desa, maka sangat memungkinkan bagi seorang perempuanpun menjadi kepala desa dengan menggunakan kharisma kakek atau orang tuanya, tetapi hal ini bukan berarti seorang perempuan mampu menjadi penguasa atas dasar kemampuan pribadi.

Hasil penelitian di atas, berbeda dengan apa yang dilakukan dan diinginkan oleh peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Djamaluddin menitik-beratkan pada peran perempuan Madura dalam memimpin dan menentukan arah kebijakan publik dalam masyarakat. Sedangkan studi yang dilakukan oleh peneliti ini membahas tentang otonomi perempuan Madura terhadap dirinya sendiri dalam menentukan arah hidupnya sendiri yang lebih menekankan pada persoalan keluarga.

⁴. Djamaluddin Karim, *Pemimpin Wanita Madura* (Surabaya: Popyrus, 2004), hlm.13-17.

Selain itu, penelitian dengan tempat yang sama juga pernah dilakukan oleh Huub De Jonge⁵ dengan judul "*Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam*". Dalam penelitian ini Huub De Jonge mencoba untuk menguui tentang peubahan yang terjadi pada masyarakat Madura. De Jonge lebih menfokuskan penelitiannya kepada perubahan-perubahan struktur yang terjadi di tengah masyaakat dari masa kemasa, dimulai dari masa kolonial (penjajahan Belanda), penjajahn Jepang, Masa kemerdekaan dan teakhir pada masa pemerintahan orde baru.

Dalam penelitiannya, De Jonge mencoba untuk menguarai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hubungan simbiosis (timbang balik) yang terjadi antara sistem perdagangan oang Madura dengan keberagamaan yang dianut oleh orang Madura. Seperti yang diungkapkan oleh De Jonge, orang Madura sangat kental dengan keislamannya.

Kuntowijoyo⁶ dengan judul "*Perubahan Sosial dalam masyarakat Agraris Madura 1850-1940*". Dalam penelitiannya Kuntowijoyo ini lebih difokuskan kepada perubahan sosial dalam masyarakat agraris Madura, dimana perubahan-perubahan yang dimaksudkan oleh Kuntowijoyo adalah perubahan pola prilaku dan sistem ekonomi masyarakat Madura, yang sebelumnya mengandalkan pertanian kini telah berubah menjadi pola berdagang dan merantau ke tempat lain.

⁵. HuubDe Jonge, *Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam* (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 10-13.

⁶. Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam masyarakat Agraris Madura 1850-1940* (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002), hlm. 23-25.

Seperti yang telah di ketahui Madura merupakan daerah yang kering dan tandus, mau tidak mau masyarakatnya harus hidup dengan pola yang berbeda, seperti bedagang atau mencari peruntungan di negeri orang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kuntowijoyo di atas belum menyentuh sama sekali tentang otonomi perempuan seperti yang akan peneliti lakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Najlah Naqiyah dengan judul "*Otonomi Perempuan*", lebih menitik beratkan kepada persoalan otoritas perempuan dalam ranah publik. Bagaimana seorang menentukan otoritas akan tubuhnya sendiri tanpa ada paksaan dan intervensi dari pihak lain.⁷ Selama ini dalam posisi perempuan selalu dimarginalisasikan, posisi perempuan selalu tidak diuntungkan lantaran perberbedaan gender dan jenis kelamin. Selain itu, perempuan terlalu dikekang oleh tradisi, budaya, dan ajaran agama yang berlaku. Otoritas orang tua atas tubuh perempuan lebih berperan dibandingkan otoritas pemilik tubuh itu sendiri.⁸ Dalam penelitiannya Najlah tidak disinggung sama sekali tentang otoritas perempuan dalam perkawinan, baik dalam menentukan jodoh maupun bentuk dan ragam dari otoritas itu sendiri.

Studi yang akan peneliti lakukan ini secara khusus dan mendalam membahas tentang otonomi perempuan Madura dalam perkawinan. Nilai-nilai yang dibangun dari pemahaman tentang agama, budaya dan ekonomi sebenarnya menyimpan berbagai macam makna yang kemungkinan besar akan mempengaruhi pada otonomi

⁷. Najlah Naqiyah, *Otonomi Perempuan* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 56-57.

⁸. *Ibid.*, hlm. 60-62.

perempuan. Karena itu, tidak menutup kemungkinan bagi peneliti untuk ikut andil dalam menggali dan menganalisa hal tersebut.

Dari beberapa referensi yang telah peneliti kaji hingga saat ini belum ada yang memiliki kesamaan materi, metodologi dan perspektif dengan penelitian yang peneliti ajukan ini.

E. Kerangka Teori

Masalah hak-hak perempuan bukanlah hal yang mudah untuk diteliti, mengingat istilah yang demikian konseptual, harus dioperasionisasikan dalam bentuk gejala-gejala yang konkret, spesifik dan dapat diamati. Masalah hak-hak perempuan, lebih khusus lagi, hak perempuan dalam perkawinan, harus dilihat dalam kaitannya dengan peran, posisi, status, nilai, serta posisi tawar perempuan dalam hubungannya dengan pihak lain. Karenanya, perspektif gender menjadi alat analisa penting dalam melihat masalah-masalah perempuan dan hak-hak perempuan.

Banyaknya faktor yang mempengaruhi kehidupan perempuan selama ini mengundang para pemikir untuk mengkaji ulang kemungkinan adanya kesalahan dalam tatanan hidup ini. Kekhawatiran tersebut tertuju pada adanya ideologi tersembunyi dalam suatu masyarakat yang memiliki peran signifikan dalam membentuk karakter serta pola berpikir perempuan. Karena itu, apapun yang dilakukan, dalam kajian gender tidak boleh mengesampingkan peran budaya lokal dalam merekonstruksi pola hidup manusia.

Budaya patriarkhi (ideologi lelaki-lakian) misalnya, yang muncul dari sistem hukum Yunani dan Romawi, di mana lelaki-laki memegang kekuasaan atas semua peran penting masyarakat baik dalam pemerintahan, pendidikan, industri, bisnis, perawatan kesehatan, dan dalam lingkup keluarga akan berakibat pada tercerabutnya peran perempuan dari akses terhadap kekuasaan itu. Karena itu, perkawinan yang secara substansial merupakan ilustrasi dari sebuah interaksi simbolik antara makhluk perempuan dan lelaki-laki dalam sebuah kesetaraan dan kehendak bersama, telah diselewengkan secara esensial maknanya dalam konteks masyarakat patriarkhi.⁹

Memposisikan lelaki-laki sebagai sosok yang bertanggung jawab dalam bidang publik dan wanita di bidang domestik, tentunya akan menimbulkan ketimpangan gender yang terus menerus. Dalam kenyataannya, wanita selalu disosialisasikan ke dalam suatu nilai dan ukuran sosial budaya yang pilihan-pilihannya ditentukan oleh lelaki-laki dalam kerangka struktural patriarkal (ideologi kelakilian).¹⁰ Asosiasi seperti ini, kadang diperkuat oleh mitos-mitos yang memperkuat dan melestarikan bahwa tempat lelaki-laki adalah di dunia kerja dalam perjuangannya untuk hidup, sementara tempat wanita di rumah, mengatur rumah tangga dan mengasuh anak. Proses sosialisasi ini dapat membatasi pilihan-pilihan hidup.

⁹. Eko Bambang Subiantoro, *Memikirkan Perkawinan*. (Jakarta: Yayasan Perempuan, 2002), hlm. 8.

¹⁰. Irwan Abdullah, *Reproduksi Ketimpangan Gender: Partisipasi Wanita dalam Kegiatan Ekonomi*. Prisma Edisi 6 Juni 1995.

Hal ini tidak lepas dari peran lingkungan sekitar seperti keluarga, sekolah dan media massa yang merupakan sumber utama dalam memahami sosok wanita yang sesuai dengan tatanan sosial. Lingkungan tersebut merupakan institusi yang sangat penting dalam membentuk hubungan laki-laki dan wanita dalam berbagai aspek kehidupan. Proses internalisasi ini akan menjadi dasar di mana laki-laki tetap lebih mampu dari perempuan.

Proses ini merupakan konstruksi yang terus menerus menegaskan suatu realitas yang mempunyai daya paksa. Apa yang diajarkan dalam keluarga atau institusi lainnya dapat dijadikan sebagai nilai atau norma yang harus diikuti dan berlaku secara sosial.¹¹ Akar sosial budaya di atas telah memberi warna dalam keterlibatan wanita dalam bidang publik. Pemaknaan keterlibatan wanita dalam sektor publik ternyata juga ditentukan oleh budaya dan ideologi.

Pengelompokan wanita ke dalam bidang domestik dan kewanitaan dapat menyebabkan terdapat adanya proses identifikasi pekerjaan-pekerjaan publik yang sesuai dengan wanita. Situasi ekonomi, sosial dan politik seseorang turut menentukan keluasan gerak transendensinya. Dalam budaya patriarkhi, sebagai jenis kelamin kedua, kehidupan ekonomi, sosial dan politik perempuan bukan hanya dibatasi, melainkan tidak diakui. Yang terjadi adalah perempuan hidup untuk menunjang kehidupan ekonomi, sosial dan politik laki-laki.

¹¹ . *Ibid.*, hlm. 39-40.

Melalui institusi ekonomi, sosial dan politik, budaya patriarki mencetak diri perempuan sesuai dengan citra ideal perempuan sebagai jenis kelamin kedua. Dari paradigma yang seperti itulah kemudian mencuatlah ke permukaan isu tentang kesetaraan dan keadilan (*equality*) gender. Ini diamini oleh semua kalangan mulai dari penentu kebijakan, akademisi maupun para aktivis pembela hak-hak perempuan sendiri untuk dijadikan semacam wacana (*discourse*). Isu ini juga menjadi sebuah refleksi atas kesadaran akan ketertindasan hak-hak perempuan.

Manifestasi dari kesadaran ini kemudian melahirkan gerakan feminis, sebuah gerakan yang pertama kali muncul di Perancis pada tahun 1880-an, yang berjuang untuk memperoleh hak politik perempuan. Gerakan feminisme berupaya membongkar mitos yang melahirkan stereotipe bahwa perempuan adalah “barang antik” yang selalu harus dijaga dan diperlakukan dengan sangat istimewa. Yang menjadi permasalahan adalah bahwa perlakuan istimewa itu melahirkan sebuah konstruksi sosial yang justru menindas hak-hak sosial perempuan itu sendiri.

Kekeliruan dalam memahami dan menginterpretasikan perbedaan gender (*gender differences*) pada suatu komunitas masyarakat, kemudian melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Salah satu contoh adalah, adanya sistem nilai yang memandang bahwa tugas pokok perempuan hanyalah di bidang domestik sedang laki-laki wilayah publik. Karena itu, konsep gender dipergunakan sebagai salah satu alat analisis dalam studi perempuan. Menurut konsep ini, kategori perempuan dan laki-laki bukan merupakan fenomena biologis, tetapi konstruksi-konstruksi kultural yang oleh karenanya berubah-ubah.

Dalam bukunya, *The Second Sex*, Simon de Beauvoir mencela determinisme biologis yang merupakan teorisasi pembedaan antara seks dominan.¹² Ide bahwa alam adalah takdir, dan bahwa perempuan karena daya prokreatifnya bertanggung jawab terhadap urusan-urusan rumah tangga, pengasuhan dan pemeliharaan yang secara alamiah merupakan seks yang lemah, mempengaruhi dunia ilmu pengetahuan dan cara pandang masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. De Beauvoir berpandangan bahwa pemahaman tentang oposisi kembar antara seks, merupakan realitas biologis yang ditafsirkan secara kultural.¹³

Wacana-wacana tersebut tidak mustahil juga terjadi pada posisi dan perempuan Madura. Keberadaan tubuhnya sangat mempengaruhi terhadap posisi dan perannya. Sebagai jenis kelamin kedua (*the second sex*) dalam struktur masyarakat, mereka tak dapat mengolah kebebasan dan identitas kediriannya dalam kegiatankegiatan yang positif, konstruktif, dan aktual. Dalam situasi yang demikian ini, pola relasi kaum laki-laki dan perempuan menjadi tak ramah lagi. Kaum laki-laki tak menghendaki adanya ketegangan relasi subjek-objek, sebagaimana dijelaskan oleh filsuf-filsuf eksistensial, dengan menyangkal subjektivitas perempuan dan menjadikannya sebagai pengada lain absolut.¹⁴

¹². Simone De Beauvoir, *The Second Sex: Kehidupan Perempuan* (terj). (Surabaya: Pustaka Prometheus, 2003), hlm. 120.

¹³. *Ibid.*, hlm. 112-115

¹⁴ Shirley Lie, *Pembebasan Tubuh Perempuan: Gugatan Etis Simone de Beauvoir Terhadap Budaya Patriarkhat* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm. 43-48.

Adanya distingsi kerja antara wilayah domestik dan publik, menurut kaum fenimisme radikal, semakin memperkuat dominasi laki-laki atas perempuan, yang sekaligus memenjarakan dan meminggirkan kaum perempuan dari peran publik atau sosial. Penciptaan dikotomi ini merupakan ciri khas dan cara kerja sistem patriarkhi. Bagi mereka akar penyebab penindasan terhadap hak-hak sosial perempuan terletak pada ideologi patriarkhi yang dikonstruksi dan disosialisasikan secara kultural.¹⁵ Patriarkhi, sebagai sebuah sistem yang sangat koheren selalu dianggap sebagai salah satu sebab dari timbulnya penindasan dan pendiskriminasian perempuan dalam hubungan-hubungan sosial.

Dalam konteks keluarga, patriarkhi memposisikan perempuan sebagai pihak yang kedua. Akibatnya, perempuan tidak memiliki hak untuk memutuskan sesuatu dalam keluarga. Argumen seperti ini hanya membuat stereotipe ideologi patriarkhi terhadap perempuan semakin nyata. Ideologi patriarkhi dapat muncul dalam bentuk simbol-simbol budaya yang memposisikan perempuan sebagai sub-ordinat dalam hubungannya dengan laki-laki diarahkan apapun, tidak hanya dalam keluarga tetapi juga dalam konteks masyarakat.¹⁶ Karena itu, perempuan mulai dihadapkan dengan posisi dan peran keluarga. Mereka harus terlebih dahulu mencermati fenomena yang terjadi dalam keluarga, sebelum mereka berjuang melawan arus budaya-budaya luar.

¹⁵ . Mansour Fakih, *Merekonstruksi Realitas dengan Perspektif Gender*, Kata Pengantar Sih Handayani dan Yos Soetiyoso (Ed). *Merekonstruksi Realitas dengan Perspektif Gender*.: (Yogyakarta: Serikat Bersama Perempuan Yogyakarta, 1997), hlm. 85.

¹⁶ . Farida, *Poligami: Dilema Bagi Perempuan* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2002), hlm. 38-39.

F. Metode Penelitian

Tidak mudah untuk menguraikan persoalan yang dikaji dalam penelitian ini. Karena itu, penelitian ini memerlukan metode sebagai salah satu upaya untuk memperoleh apa yang diinginkan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mempelajari secara mendalam dan holistik salah satu budaya yang diciptakan dalam masyarakat Madura. Penelitian kualitatif ini dipilih karena hal ini sangat menekankan bahwa sifat penelitian ini penuh dengan nilai (*valueladen*).¹⁷

Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menekankan bagaimana pikiran dan pengalaman sosial diciptakan dan diberi arti. Bila dilihat dari tujuan dari penelitian ini, tipe dalam studi ini adalah penelitian deskriptif (*description research*), yaitu penelitian yang di dalamnya memberikan uraian secara deskriptif berkenaan dengan suatu kolektifitas tertentu, sehingga dengan tipe penelitian ini dicermati fenomena otonomi perempuan Madura (Desa Poteran) dalam perkawinan tidak sekedar sebagai fenomena alam, melainkan hasil dari konstruksi sosial yang terbangun oleh nilai-nilai agama, budaya, ekonomi atau lainnya. Tipe ini dipakai, karena tujuan utamanya adalah menggambarkan secara detail realitas sosial yang begitu kompleks.¹⁸

Secara metodologis, dasar dari penelitian ini adalah menggunakan studi kasus (*case study*) dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan yang mendalam

¹⁷. Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 25-26.

¹⁸. J. Vrendenbregt, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 34.

mengenai topik yang dikaji, yaitu otonomi perempuan Madura dalam Perkawinan. Metode dasar ini digunakan sebagai suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan (*wholness*) dari obyek yang diteliti, sehingga data yang dikumpulkan dalam studi kasus ini dapat dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi. Di samping itu, metode studi kasus merupakan *inquiry* empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Bukti sumber-sumber dapat dimanfaatkan jika batas-batas antara fenomena dan konteks tidak kelihatan dengan jelas.¹⁹

G. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan tepatnya di Desa Poteran Sumenep Madura. Pemilihan lokasi dan *setting* sosial ini didasarkan pada beberapa alasan: *pertama*, di desa ini banyak ditemukan bahwa keputusan perkawinan masih berada di tangan orang tua. *Kedua*, kuatnya peran agama dan budaya dalam persoalan perkawinan anak perempuan. *Ketiga*, banyaknya perempuan yang terlibat dalam sektor ekonomi formal untuk menunjang ekonomi keluarga *Keempat*, pendidikan perempuan mulai diarahkan pada pendidikan formal tetapi mayoritas mereka masih berpendidikan pesantren. Hal seperti yang diungkapkan di ataslah yang menjadikan lokasi ini menarik untuk diteliti.

¹⁹ . *Ibid.*, hlm. 32.

H. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data-data yang dikumpulkan langsung pada saat penelitian lapangan. Sementara itu data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan lebih detail tentang penggunaan ketiga teknik pengumpulan data tersebut, yaitu:

1. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap obyek penelitian.²⁰

Observasi merupakan langkah awal penelitian, tujuannya untuk melihat persoalan umum dan mendasar berkaitan dengan otonomi perempuan. Fokus observasi yaitu: a) keluarga atau rumah tangga yang terkait; b) perempuan yang sudah menikah dan yang belum menikah; c) tokoh masyarakat. Dalam kegiatan ini, peneliti tinggal dan terlibat dalam masyarakat untuk mengamati kesehariannya serinci mungkin dan dikumpulkan sehingga menjadi suatu catatan lapangan atau *fieldnotes*. Hasil pengamatan ini kemudian digunakan untuk merumuskan langkah-langkah penelitian lebih lanjut. Observasi lapangan dilakukan beberapa kali sampai penelitian ini selesai dilaksanakan.

²⁰. Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 30-31.

2. *Indepth interview*, yaitu wawancara mendalam kepada kelurga dan perempuan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.²¹ Tujuannya adalah untuk mengetahui persepsi dan sikap mereka berkaitan dengan tema penelitian *Indepth interview* dilakukan kepada para tokoh masyarakat yang memahami dan sering terlibat langsung. Di samping itu juga dilakukan wawancara terhadap sekitar delapan perempuan yang telah menikah dalam usia dibawah 17 tahun serta perempuan yang telah ditunangkan dalam masa pendidikan Sekolah Dasar dan dengan atas dasar perjodohan. Penelitian ini juga melibatkan enam orang tua perempuan yang terkait serta dua tokoh masyarakat. Menurut hemat peneliti, jumlah informan tersebut dianggap cukup untuk mendapatkan informasi yang dapat menjawab permasalahan penelitian.

3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumendokumen yang terkait dengan tema penelitian.²² Dokumen-dokumen tersebut berupa laporan hasil penelitian, buletin, jurnal, laporan kegiatan, prosiding seminar atau lokakarya, rencana kegiatan, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengelolaan, data statistik, buku, dan lain-lain.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman isi dan esensi dari skripsi ini. Maka deskripsi ini akan disistematisasikan penyajiannya berdasarkan kategorisasi pembahasan sebagai berikut:

²¹. *Ibid.*, hlm. 30.

²². *Ibid.*, hlm. 31

Diawali dengan *Bab I*, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Kemudian *Bab II*, berbicara tentang kondisi sosial-budaya masyarakat Madura, kedudukan dan status perempuan Madura.

Selanjutnya *Bab III*, perkawinan dalam masyarakat Madura, mencakup kepada adat perkawinan, masa perijodohan, fenomena perkawinan, kemudian adanya otoritas pesantren yang menyebabkan hal ini terjadi dan ketidak berpihakan pesantren.

Sedangkan *Bab IV*, yang merupakan intisari pembahasan yang mengetengahkan tentang otonomi perempuan Madura dalam perkawinan. Dalam hal ini penulis mencoba mengetengahkan beberapa persoalan yang sekiranya mampu menjawab rumusan masalah sebelumnya. Pertama, masalah patriarkhi dan adat perkawinan, kedua, masalah perkawinan dan status perempuan dalam keluarga, ketiga, identitas diri perempuan dalam keluarga, keempat, pertaruhan eksistensi perempuan dalam perkawinan, kelima, dekonstruksi pandangan atas budaya merupakan sebuah tawaran.

Terakhir *Bab V*, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis berdasarkan seluruh hasil pembahasan yang dilakukan dan ditekuni selama dalam proses awal sampai akhir penyusunan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan, dimana kesimpulan tersebut menjadi catatan kritis bagi peneliti. Kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian tersebut sebagai berikut :

Arti dan makna dai otonomi perempuan itu sendiri bagi masyarakat desa Poteran, Sumenep Madura lebih dititik beratkan kepada posisi perempuan dalam rumah tangga. Hal ini lebih di artikan sebagai posisi dan peran yang dimainkan oleh perempuan dalam wilayah rumah tangga. Bagaimana seorang perempuan menentukan dan menjalankan otoritasnya sebagai manusia yang menjadi persoalan tentang perempuan dalam masyarakat Desa Poteren, Sumenep, Madura yang menganut sistem patriarkhi adalah, terjadinya sebuah sublimasi identitas dengan eksistensi diri perempuan pada laki-laki. Sublimasi ini tidak tampak secara kasat mata sebagai bentuk penindasan yang nyata. Ia berada dalam ruang kesadaran rasionalitas dan psikologis. Ketika dalam kesadarannya, perempuan merasa harus tunduk dan patuh pada laki-laki dalam konteks perkawinan, maka pada saat itulah persoalan sublimasi rasionalitas perempuan telah bekerja dalam dirinya. Ideologi yang dikonstruksikan, dilembagakan dan disosialisasikan melalui institusi-institusi yang terlibat sehari-hari dalam kehidupan seperti keluarga, sekolah, masyarakat, agama, tempat bekerja

sampai kepada kebijakan Negara semakin menemukan kedudukannya dalam konteks perkawinan.

Status dan posisi perempuan Desa Poteran, Sumenep Madura, hingga saat ini masih ter subordinasi oleh laki-laki. Kebudayaan masyarakat Desa Poteran, Sumenep, Madura masih sarat dengan muatan ideologi patriarkhi yang hegemonik. Ideologi patriarkhi menjadi terlembagakan secara kultural yang memaksa masyarakat, terutama perempuan untuk menerima kondisi subordinasinya sebagai sebuah realitas. Hal ini membuktikan bahwa sistem patriarkhi sudah terlembagakan dalam institusi perkawinan, di mana perempuan mengalami subordinasi ganda, yakni dikuasai oleh dua kekuatan secara bersamaan, *pertama*, oleh bapak dalam komunitas keluarga, dan *kedua* oleh suami dalam komunitas rumah tangga.

B. Saran

Dalam perkembangan arus informasi dan modernisasi yang cukup pesat, segala sesuatu baik budaya atau sosial pasti mengalami perubahan. Budaya-budaya yang berlaku mulai memudar diterpa arus globalisasi. Masyarakat Madura tidak lagi terpaku dalam satu budaya. Mereka mulai mencari budaya baru yang lebih sesuai dengan kondisi sosialnya.

Pendidikan bagi kaum perempuan mulai diarahkan pada kondisi yang lebih sesuai. Pendidikan perempuan tidak lagi diarahkan pada kondisi kolot. Mereka sudah dihadapkan pada situasi yang lebih modern. Keterlibatan perempuan dalam sector ekonomi mulai diperhitungkan. Mereka tidak lagi menjadi pembantu kaum laki-laki.

Bahkan, tidak sedikit di antara mereka yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Namun, semua itu bukan berarti perempuan mendapatkan ruang gerak dan berpikir yang cukup untuk menentukan jalan hidupnya. Mereka masih terkungkung oleh budaya patriarkhi dimana posisi keluarga masih kuat dalam menentukan pilihan-pilihan yang berkaitan dengan persoalan perkawinan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. *Reproduksi Ketimpangan Gender: Partisipasi Wanita dalam Kegiatan Ekonomi*. Prisma Edisi 6 Juni 1995.
- Anshori, Dadang S., Kosasih, Engkos. dan Sarimaya, Farida. *Memperbincangkan Fenimisme; Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Al-Fayyadl, Muhammad, Derrida, Yogyakarta: LkiS, 2005.
- Azwar, Welhendri, *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuk; Studi Kasus Tentang Perempuan dalam Tradisi Bajapuk*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Bachtar, Harsja. W., *Pengamatan sebagai Suatu Metode Penelitian*, dalam Koentjaraningrat (Ed). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia, 1991.
- Beauvoir, Simone De, *Second Sex: Kehidupan Perempuan*. Pustaka Surabaya: Promethea, 2003.
- Bhasin, Kamla, *Menggugat Patriarki; Pengantar Tentang Persoalan Dominasi Terhadap Kaum Perempuan*, Yogyakarta: Bentang, 1996.
- Ciciek, Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Danujaya, Budiarta, *Obituari Jacques Derrida (1930-2004): Dekonstruksi dan Kontroversi*, Jakarta: Kompas, 2004.
- De Jonge, Huub, *Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam*. Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
- El Saadawi, Nawal, *Perempuan dalam Budaya Patriarki*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Engels, Friedrich, *The Origins Of The Family, Private Property, and The State*, New York: Penguin Books, 1986.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: LSPPA, 2002.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*.: Yogyakarta Pustaka Pelajar, 1999.
- Fakih, Mansour, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*.:Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Fakih, Mansour. *Merekonstruksi Realitas dengan Perspektif Gender*, Kata Pengantar Sih Handayani dan Yos Soetiyoso (Ed). *Merekonstruksi Realitas dengan Perspektif Gender*. Yogyakarta: Serikat Bersama Perempuan Yogyakarta, 1997.
- Farida, *Memikirkan Perkawinan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2002.
- Foreman, Anne, *Femininity as Alienation: Women and The Family in Marxism and Psychoanalysis*, London: Pluto Press, 1997.
- Foucault, Michel, *Pengetahuan dan Metode Karya-Karya Pening Foucault*, (terj), Yogyakarta: Jalasutra, 2002.

- Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1981.
- Ghozali, Abdul Muqstith, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 2002.
- Julia, Suryakusuma, *Wanita dalam Mitos, Realitas dan Emansipasi*. Prisma Edisi 13 Juli 1981.
- Karim, A. Djamaluddin, *Pemimpin Wanita Madura*. Surabaya: Penerbit Popyrus, 2004.
- Karmi, Ghada, Women, Islam and Patriarchalism, dalam Mai Yamani (Ed). *Feminism and Islam Legal and Literary Perspective*, New York: New York University Press, 1996.
- Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam masyarakat Agraris Madura 1850-1940*. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002.
- Leahy, Louis, *Manusia, Sebuah Misteri Sintesa Filosofis tentang Makhhluk Paradoks*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Lie, Shirley, *Pembebasan Tubuh Perempuan: Gugatan Etis Simone de Beauvoir Terhadap Budaya Patriarkhat*. Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Mansurnoor, Iik Arifin. 1990. *Islam in an Indonesian World; Ulama of Madura*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan, 1999.
- Mernissi, Fatimah, *Beyond The Veil: Seks dan Kekuasaan Dinamika Pria Wanita dalam Masyarakat Muslim Modern*. Surabaya: Alfiqr.1999.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mosse, Julia Cleves, *Gender dan Pembangunan*, Yogyakarta: RIFKA ANNISA dan Pustaka Pelajar, 2003.
- Murniati, A. Nunuk, *Getar Gender; Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga*. Magelang: IndonesiaTera, 2004.
- Muthmainnah, *Jembatan Suramadu; Respon Ulama Terhadap Industrialisasi*, Yogyakarta: LKPSM, 1998.
- Naqiyah, Najlah, *Otonomi Perempuan*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Ollenburger, Jane C., Helen A Moore. *Sosiologi Wanita*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Otoluwa, Moon Hidayati, *Sosok Seorang Ibu Idaman: Suatu Studi tentang Jati Diri Seorang Perempuan*. Makalah tidak diterbitkan, 2003.
- Prabasmoro, Aquarini Priyatna. *Kajian Budaya Feminis; Tubuh, Sastra, dan Budaya Pop*. Yogyakarta; Jala Sutra, 2006.
- Ratih, Ayu. 2002. Memperjuangkan Ruang Perempuan dalam Perkawinan dalam Jurnal Perempuan Edisi 22. Memikirkan Perkawinan, Yayasan Perempuan
- Robert, K. Yin. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Rajawali Pers, 1997..

- Rozaki, Abdur. *Menabur Kharisma Menuai Kuasa*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004.
- Salim, Agus. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial dari Densin Guba dan Penerapannya*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Saptari, Ratna dan Brigitte Holzner. *Perempuan Kerja, dan Perubahan Sosial; Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1997.
- Subiantoro, Eko Bambang, *Memikirkan Perkawinan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Supelli, Karlina Leksono. 2003. *Jarak Fungsi dan Diri dalam Deagamisasi Keluarga*. Jurnal Basis No. 05-06 tahun ke 52, Mei-Juni 2003.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius 1987.
- Tong, Rosemarie Putnam 1989. *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. Boulder USA: West-view Press, 1989..
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Venny, Andriana. 2002. *Perkawinan: Perangkap bagi Perempuan dalam Jurnal Perempuan Edisi 22*. Memikirkan Perkawinan, Yayasan Perempuan
- Wiyata, A. Latif Carok: *Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, Yogyakarta: LKiS: 2002.
- Vrendenbregt, J., *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1987.